



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah, diperlukan Peta Jalan dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah, sehingga perlu dilakukan pengendalian inflasi secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, menyatakan bahwa Bupati menyusun peta jalan pengendalian inflasi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana strategis sebagai pedoman dalam pengendalian Inflasi Daerah.
6. Inflasi Daerah adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
7. Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah Tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait yang melaksanakan kegiatan penyusunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pengendalian Inflasi Daerah.
8. Strategi keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif yang selanjutnya disingkat 4K adalah strategi pengendalian Inflasi Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2029.

- (2) Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pendanaan dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 – 2029 bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 26 Januari 2026

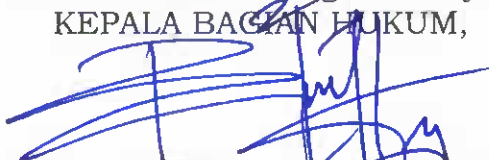
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 4 TAHUN 2026
 TENTANG : PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI
 DAERAH TAHUN 2025 - 2029

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2025 - 2029

Strategi 4K	Program Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Keterjangkauan Harga	1. Operasi Pasar	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Dinas Perindagkop dan UM
	2. Gerakan Pangan Murah	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Dinas KPTPHP
	3. Pemantauan dan pelaporan setiap hari terhadap pergerakan harga kebutuhan pokok masyarakat melalui aplikasi panel Badan Pangan Nasional.	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Dinas KPTPHP
	4. Monitoring terpadu untuk mengawasi keterjangkauan (stabilisasi) harga dan ketersediaan pasokan terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	TPID

Strategi 4K	Program Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
	5. Optimalisasi kegiatan SPHP melalui Mitra Kerja Penjualan (RPK/TPK) dan Satgas SPHP Kantor Cabang Sanggau	2.000.000 kg/tahun	2.000.000 kg/tahun	2.000.000 kg/tahun	2.000.000 kg/tahun	2.000.000 kg/tahun	BULOG
	6. Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar di beberapa lokasi strategis (pasar dan pusat keramaian lainnya) dengan menjual komoditi beras premium, minyak, gula dan tepung.	4 kali dalam sebulan / menyesuaikan kebutuhan	4 kali dalam sebulan / menyesuaikan kebutuhan	4 kali dalam sebulan / menyesuaikan kebutuhan	4 kali dalam sebulan / menyesuaikan kebutuhan	4 kali dalam sebulan / menyesuaikan kebutuhan	BULOG
Keterjangkauan Harga	7. Menjaga daya beli masyarakat, melalui:						Dinas Sosial, P3AKB
	- Penyelenggaraan bantuan sosial Program Keluarga Harapan	8.312 keluarga	8.312 keluarga	8.312 keluarga	8.312 keluarga	8.312 keluarga	
	- Penyelenggaraan program sembako (APBN)	23.163 keluarga/paket	23.183 keluarga/paket	23.183 keluarga/paket	23.163 keluarga/paket	23.183 keluarga/paket	
	- Penyelenggaraan program sembako (APBD)	250 keluarga/paket	250 keluarga/paket	250 keluarga/paket			

Strategi 4K	Program Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Keterjangkauan Harga	- Bantuan uang kepada lansia terlanter	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	Dinas Sosial, P3AKB
	- Bantuan uang kepada keluarga penyandang disabilitas	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	Dinas Sosial, P3AKB
	- Hibah uang kepada yayasan dan ponpes	7 yayasan/ponpes	7 yayasan/ponpes	7 yayasan/ponpes	7 yayasan/ponpes	7 yayasan/ponpes	Dinas Sosial, P3AKB
	- Hibah uang kepada LKS dan LKSA	3 LKS dan LKSA	3 LKS dan LKSA	3 LKS dan LKSA	3 LKS dan LKSA	3 LKS dan LKSA	Dinas Sosial, P3AKB
	- Penyediaan makanan untuk bencana	300 orang	330 orang	363 orang	393 orang	426 orang	Dinas Sosial, P3AKB
Ketersediaan Pasokan	1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	80 Ton	80 Ton	80 Ton	80 Ton	80 Ton	Dinas KPTPHP
	2. Peningkatan produksi tanaman pangan						Dinas KPTPHP

Strategi 4K	Program Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Ketersediaan Pasokan	- Peningkatan produksi padi	Produksi padi meningkat dari 67.750 ton menjadi 71.137 ton.	Produksi padi meningkat dari 71.137 ton menjadi 74.694 ton.	Produksi padi meningkat dari 74.694 ton menjadi 76.429 ton.	Produksi padi meningkat dari 76.429 ton menjadi 80.327 ton.	Produksi padi meningkat dari 80.327 ton menjadi 84.183 ton.	Dinas KPTPHP
	- Peningkatan produksi jagung	Produksi jagung meningkat dari 10.252 ton menjadi 10.765 ton.	Produksi jagung meningkat dari 10.765 ton menjadi 11.303 ton.	Produksi jagung meningkat dari 11.303 ton menjadi 11.868 ton.	Produksi jagung meningkat dari 11.868 ton menjadi 12.461 ton.	Produksi jagung meningkat dari 12.461 ton menjadi 13.084 ton.	Dinas KPTPHP
	3. Peningkatan produksi hortikultura						
	- Peningkatan produksi cabai rawit	Produksi cabai rawit meningkat dari 1.324 ton menjadi 1.390 ton	Produksi cabai rawit meningkat dari 1.390 ton menjadi 1.460 ton	Produksi cabai rawit meningkat dari 1.460 ton menjadi 1.533 ton	Produksi cabai rawit meningkat dari 1.533 ton menjadi 1.610 ton	Produksi cabai rawit meningkat dari 1.610 ton menjadi 1.690 ton	Dinas KPTPHP
	- Peningkatan produksi cabai merah besar	Produksi cabai merah besar meningkat dari 489 ton menjadi 513 ton	Produksi cabai merah besar meningkat dari 513 ton menjadi 539 ton	Produksi cabai merah besar meningkat dari 539 ton menjadi 566 ton	Produksi cabai merah besar meningkat dari 566 ton menjadi 594 ton	Produksi cabai merah besar meningkat dari 594 ton menjadi 624 ton	Dinas KPTPHP

Strategi 4K	Program Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Ketersediaan Pasokan	- Pengembangan kebun cabai	993 hektar	1043 hektar	1095 hektar	1150 hektar	1208 hektar	Dinas KPTPHP
	- Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pasca panen komoditas hortikultura	-	-	Perencanaan Pembangunan Fasilitas	Pembangunan Fasilitas Tahap 1	Pembangunan Fasilitas Tahap 2	Dinas KPTPHP
	4. Peningkatan produksi peternakan						
	- Peningkatan produksi ayam pedaging	Produksi daging ayam meningkat dari 5.335.200 kg menjadi 5.341.158 kg	Produksi daging ayam meningkat dari 5.341.158 kg menjadi 5.875.274 kg	Produksi daging ayam meningkat dari 5.875.274 kg menjadi 6.756.565 kg	Produksi daging ayam meningkat dari 6.756.565 kg menjadi 7.770.050 kg	Produksi daging ayam meningkat dari 7.770.050 kg menjadi 8.935.557 kg	Dinas BUNNAK
	- Peningkatan produksi telur ayam ras	Produksi telur ayam ras meningkat dari 103.501 kg menjadi 106.441 kg	Produksi telur ayam ras meningkat dari 106.441 kg menjadi 109.381 kg	Produksi telur ayam ras meningkat dari 109.381 kg menjadi 120.319 kg	Produksi telur ayam ras meningkat dari 120.319 kg menjadi 132.351 kg	Produksi telur ayam ras meningkat dari 132.351 kg menjadi 145.586 kg	Dinas BUNNAK
	- Peningkatan produksi sapi potong	Produksi sapi potong meningkat dari 176.684 kg menjadi 204.684 kg	Produksi sapi potong meningkat dari 204.684 kg menjadi 227.563 kg	Produksi sapi potong meningkat dari 227.563 kg menjadi 270.797 kg	Produksi sapi potong meningkat dari 270.797 kg menjadi 322.245 kg	Produksi sapi potong meningkat dari 322.245 kg menjadi 383.467 kg	Dinas BUNNAK

Strategi 4K	Program Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
	Penyediaan bibit ternak	bibit sapi 95 ekor, ayam buras 2.310 ekor, itik 2.800 ekor	bibit sapi 109 ekor, ayam buras 2.657 ekor, itik 3.220 ekor	bibit sapi 125 ekor, ayam buras 3.050 ekor, itik 3.703 ekor	bibit sapi 143 ekor, ayam buras 3.501 ekor, itik 4.259 ekor	bibit sapi 164 ekor, ayam buras 4.019 ekor, itik 4.897 ekor	Dinas BUNNAK
	- Inseminasi buatan	400 ekor sapi/tahun	440 ekor sapi/tahun	600 ekor sapi/tahun	818 ekor sapi/tahun	1.116 ekor sapi/tahun	Dinas BUNNAK
	- Pelayanan kesehatan ternak	10.000 ekor/tahun	11.000 ekor/tahun	12.000 ekor/tahun	13.000 ekor/tahun	14.000 ekor/tahun	Dinas BUNNAK
	- Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha peternakan dan usaha produk hewan	285 unit usaha yang dibina	300 unit usaha yang dibina	315 unit usaha yang dibina	330 unit usaha yang dibina	345 unit usaha yang dibina	Dinas BUNNAK
	- Sertifikasi nomor kontrol veteriner pada unit usaha peternakan	20 unit usaha	12 unit usaha	20 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	Dinas BUNNAK
	Pembangunan infrastruktur peternakan melalui:						
	- Pembangunan kandang tertutup (close house) ayam broiler.	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Dinas BUNNAK

Strategi 4K	Program Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Ketersediaan Pasokan	- Penambahan bibit DOC ayam pedaging	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Dinas BUNNAK
	- Pembangunan rumah potong unggas (RPU).	0	0	1 unit	2 unit	3 unit	Dinas BUNNAK
	5. Pembangunan infrastruktur pertanian melalui:						
	- Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT).	3.621 meter/tahun	6.541 meter/tahun	5.081 meter/tahun	3.621 meter/tahun	6.541 meter/tahun	Dinas KPTPHP
	- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani.	1 unit/tahun	10 unit/tahun	5 unit/tahun	1 unit/tahun	10 unit/tahun	Dinas KPTPHP
	- Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	0,462 Km	0,462 Km	0,462 Km	0,462 Km	0,462 Km	Dinas PUPR
	- Pembangunan bendung irigasi.	5 bendung	5 bendung	5 bendung	5 bendung	5 bendung	Dinas PUPR

Strategi 4K	Program Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Ketersediaan Pasokan	- Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan.	1,33 km	1,33 km	1,33 km	1,33 km	1,33 km	Dinas PUPR
	- Rehabilitasi bendung irigasi.	7 bendung	7 bendung	7 bendung	7 bendung	7 bendung	Dinas PUPR
	- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.	35,7 km	35,7 km	35,7 km	35,7 km	35,7 km	Dinas PUPR
	6. Menjaga ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk kebutuhan Operasi Pasar, Gerakan Pangan Murah, penjualan komersial maupun penyaluran bantuan dalam kondisi darurat						
	- Pengadaan beras premium dalam negeri.	500.000 kg/tahun	500.000 kg/tahun	500.000 kg/tahun	500.000 kg/tahun	500.000 kg/tahun	BULOG
	- Pengadaan gula dalam negeri	150.000 kg/tahun	150.000 kg/tahun	150.000 kg/tahun	150.000 kg/tahun	150.000 kg/tahun	BULOG
	- Pengadaan minyak goreng dalam negeri	100.000 kg/tahun	100.000 kg/tahun	100.000 kg/tahun	100.000 kg/tahun	100.000 kg/tahun	BULOG

Strategi 4K	Program Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Ketersediaan Pasokan	- Pengadaan tepung terigu dalam negeri	10.000 kg/tahun	10.000 kg/tahun	10.000 kg/tahun	10.000 kg/tahun	10.000 kg/tahun	BULOG
	- Penerimaan move regional (peralihan stock antar wilayah di Kalbar) dan Move Nasional (peralihan stock secara nasional) atas beras PSO luar negeri dan dalam negeri	4.000.000 kg/tahun	4.000.000 kg/tahun	4.000.000 kg/tahun	4.000.000 kg/tahun	4.000.000 kg/tahun	BULOG
	7. Kajian Potensi Komoditas Kecamatan:						
	- Kegiatan kajian potensi yang dimiliki oleh setiap Kecamatan di Kabupaten Sanggau	-	-	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	BAPERIDA
	- Penetapan komoditas unggulan Per-Kecamatan	-	-	1 Kecamatan 1 Komoditas	1 Kecamatan 1 Komoditas	1 Kecamatan 1 Komoditas	BAPERIDA
	- Penguatan Kelembagaan tentang Potensi Komoditas Unggulan Kecamatan	-	-	Program bantuan Komoditas Produk Unggulan	Program bantuan Komoditas Produk Unggulan	Program bantuan Komoditas Produk Unggulan	BAPERIDA

Strategi 4K	Program Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Ketersediaan Pasokan	- Komoditas Masuk Pasar	-	-	-	Produk di Pasarkan	Kontrol Produk Komoditas Unggulan	BAPERIDA
	8. Pembentukan Badan Usaha Pemerintah Daerah (BUMD)						
	- Pembangunan BUMD bidang Pangan	-	-	-	-	1	Bag. Ekonomi & SDA
	- Pembangunan BUMD bidang Logistik	-	-	-	-	-	Bag. Ekonomi & SDA
	1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan melalui:						
	- Jalan kabupaten						Dinas PUPR
	- Penambahan jalan mantap	8,03 km	12,03 km	18,03 km	22,03 km	26,03 km	Dinas PUPR
	- Pembangunan jembatan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	unit	Dinas PUPR

Strategi 4K	Program Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Kelancaran Distribusi	- Pembangunan jalan dan jembatan						
	- Rekonstruksi jalan	4 Km	4 Km	4 Km	4 Km	Km	Dinas PUPR
	- Rehabilitasi jalan	14,03 Km	14,03 Km	14,03 Km	14,03 Km	14,03 Km	Dinas PUPR
	- Pemeliharaan berkala jalan	3 Km	3 Km	3 Km	3 Km	Km	Dinas PUPR
	- Rehabilitasi jembatan	0,032 Km	0,032 Km	0,032 Km	0,032 Km	0,032 Km	Dinas PUPR
	- Jalan poros antar desa						
	- Pembangunan jalan	5,0028 km	5,0028 km	5,0028 km	5,0028 km	5,0028 km	Dinas PERKIMTAN
	- Pembangunan jembatan	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	Dinas PERKIMTAN
	- Pemeliharaan jembatan	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	Dinas PERKIMTAN

Strategi 4K	Program Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
	2. Pengawasan kondisi kelancaran lalu lintas dan manajemen lalu lintas, melalui :						
	- Penguatan angkutan sungai yang masih berfungsi sebagai sarana angkutan orang dan barang di kecamatan.	7 kapal	7 kapal	7 kapal	7 kapal	7 kapal	Dinas Perhubungan
	- Monitoring aktivitas bongkar muat barang dan orang di dermaga sungai danau milik daerah.	9.950 orang dan 24.634 ton	10.115 orang dan 24.700 ton	10.500 orang dan 24.900 ton	10.900 orang dan 25.200 ton	11.746 orang dan 25.500 ton	Dinas Perhubungan
	- Monitoring aktivitas penyeberangan kendaraan di dermaga penyeberangan milik daerah.	2.936 unit	2.950 unit	3.000 unit	3.050 unit	3.100 unit	Dinas Perhubungan

Strategi 4K	Program Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Kelancaran Distribusi	3. Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.	7.430 kendaraan	8.105 kendaraan	8.915 kendaraan	9.806 kendaraan	10.786 kendaraan	Dinas Perhubungan
	4. Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi sungai.	1 dermaga bongkar muat	2 dermaga bongkar muat	2 dermaga bongkar muat	2 dermaga bongkar muat	2 dermaga bongkar muat	Dinas Perhubungan
	5. Kerja sama antar daerah	Penyusunan Kesepakatan Kerjasama	1 kerjasama	-	-	-	TPID
Komunikasi Efektif	1. Penyediaan informasi harga di tingkat konsumen update harga per minggu melalui aplikasi epasar (sp2kp.pasarsanggau.com)	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	Dinas Perindagkop dan UM
	2. Pemantauan dan pelaporan setiap hari terhadap pergerakan harga kebutuhan pokok masyarakat melalui aplikasi SP2KP Kementerian Perdagangan.	230 kali	230 kali	230 kali	230 kali	230 kali	Dinas Perindagkop dan UM
	3. Penyediaan informasi Neraca Pangan Strategis	1 laporan/bulan	1 laporan/bulan	1 laporan/bulan	1 laporan/bulan	1 laporan/bulan	Dinas KPTPHP

Strategi 4K	Program Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Komunikasi Efektif	4. Rapat internal TPID	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	TPID
	5. Rapat koordinasi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	TPID
	6. Kegiatan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	-	5 kali	15 kali	30 kali	30 kali	Dinas Perindagkop dan UM
	7. Pembentukan Integrasi 1 Sistem antar Organisasi Perangkat Daerah:						
	- Pembangunan sistem informasi harga	-	-	1 Dokumen kajian & desain sistem informasi harga	Sistem prototipe berjalan, data harga harian mulai terkumpul	Sistem informasi terintegrasi beroperasi di ≥5 pasar & gudang	Dinas Perindagkop dan UM

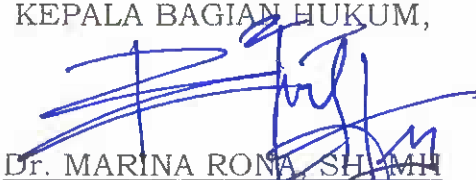
Strategi 4K	Program Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
	- Pemanfaatan IoT & big data untuk prediksi harga pasokan berbasis real-time	-	-	1 Dokumen kajian teknologi IoT & big data	Model prediksi harga awal tersedia, akurasi 60-70%.	Model prediksi harga akurat ≥80%, IoT berjalan di 3+ lokasi.	TPID

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002